

# SIMULASI SIDANG DEWAN KEAMANAN PBB SEBAGAI UPAYA MEMAHAMI DINAMIKA KEAMANAN INTERNASIONAL

**Luerdi<sup>1</sup>, Arie Fitria<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung

<sup>2</sup>Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung

Email: [luerdi@fisip.unila.ac.id](mailto:luerdi@fisip.unila.ac.id)

Email: [arie.fitria@fisip.unila.ac.id](mailto:arie.fitria@fisip.unila.ac.id)

## **Abstrak**

Dewan Keamanan merupakan salah satu badan penting dalam organisasi PBB yang memiliki misi utama menjaga perdamaian dunia. Namun, badan ini sering dianggap gagal dalam menghentikan konflik-konflik besar yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, salah satunya adalah konflik Palestina-Israel yang saat ini masih berlangsung. Ketidakefektifan atau kegagalan fungsi PBB ini sering menjadi pertanyaan atau perdebatan di kalangan pengamat dan penstudi hubungan internasional, termasuk mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Berangkat dari situasi ini, kegiatan pengabdian dalam bentuk simulasi sidang Dewan Keamanan PBB perlu dilaksanakan untuk memfasilitasi pemahaman mahasiswa terkait dinamika keamanan internasional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memiliki pengalaman terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kontestasi kepentingan negara-negara. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kepemimpinan dan kemampuan pemecahan masalah. Secara umum, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada mahasiswa yang menjadi peserta.

*Kata kunci: Simulasi, Dewan Keamanan, konflik, keamanan internasional.*

## **Abstract**

The United Nations Security Council is one of the important organs within the United Nations with the mission to maintain world peace. However, the global organization is often considered to have failed to end raging conflicts turning to humanitarian crises, one of which is the ongoing Palestine-Israel conflict. The ineffectiveness or failure of such a function often raises questions and debates among observers and scholars, including students of international relations at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. Driven by such a situation, it was necessary to facilitate a community service activity in the form of a simulation session at the United Nations Security Council so that students would gain a better understanding of international security dynamics. Through the simulation session, students would experience getting involved in the decision-making process and contesting national interests of states in the organ as well as gain the opportunity to practice leadership and problem-solving. Such a community service program could run well and provide priceless benefits to the participants.

*Keywords: Simulation, United Nations Security Council, conflict, international security.*

## 1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mawadahi kerjasama antar bangsa dan menciptakan perdamaian setelah berakhirnya Perang Dunia II. Diantara badan-badan yang ada dalam PBB, Dewan Keamanan sering dianggap sebagai badan yang paling penting dan bergengsi dengan 5 negara pemenang Perang Dunia II sebagai anggota tetap (P-5) dan 10 negara anggota tidak tetap. Di badan ini, konflik-konflik kemanusiaan di berbagai belahan dunia diperdebatkan untuk menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, efektifitas PBB dalam menghadapi konflik besar sering ditentukan oleh sejauh mana kesepakatan antar negara anggota Dewan Keamanan, khususnya anggota tetap (P-5) dapat dicapai.

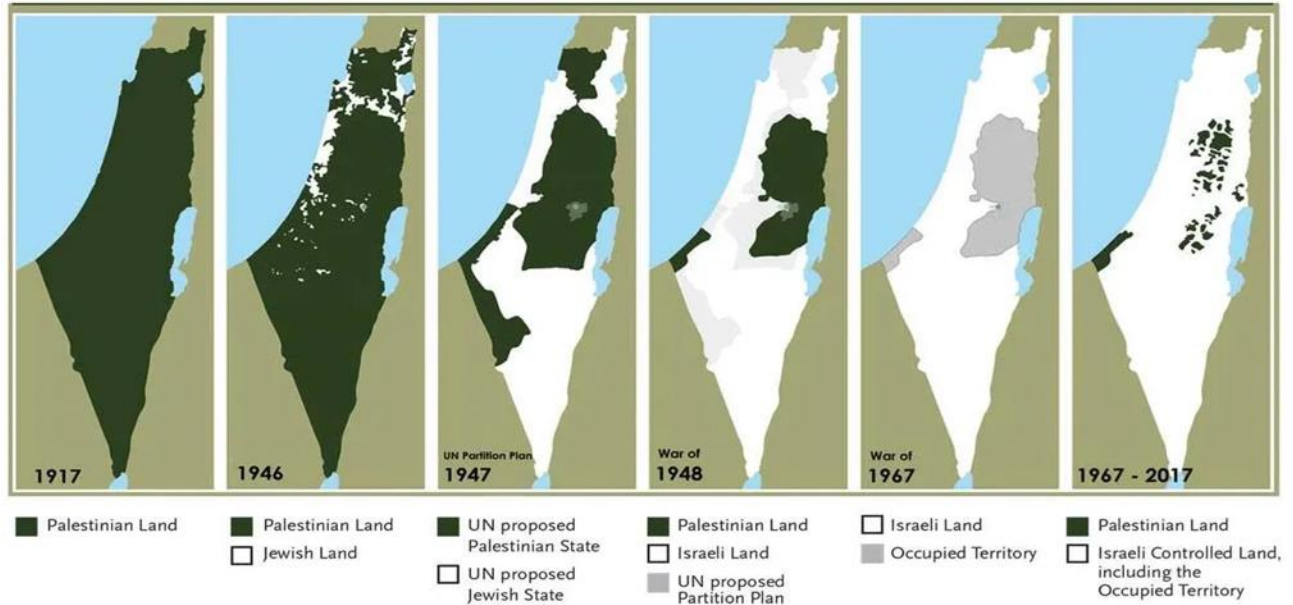
Salah satu konflik yang saat ini menjadi perhatian komunitas internasional adalah konflik Palestina-Israel. Konflik yang berulang-ulang antar kedua entitas tersebut telah terjadi selama lebih dari 70 tahun sejak migrasi bangsa Yahudi Eropa dan pendirian negara Israel di tanah Palestina yang saat itu berada di bawah mandat Inggris (Luerdi et al., 2024). Babak konflik Palestina-Israel yang terbaru terjadi setelah HAMAS – salah satu gerakan resistensi atau perlawanan untuk kemerdekaan negara Palestina – melakukan serangan ke wilayah pendudukan Israel pada 7 Oktober 2023.<sup>1</sup> Pemerintah sayap kanan Israel membalas tindakan tersebut dengan agresi militer yang mengarah pada aksi genosida terhadap bangsa Palestina di wilayah Gaza. Per 29 Mei 2024, telah tercatat 35.984 korban meninggal dan 80.643 lainnya luka-luka (Xinhua, 2024).

Agresi militer Israel juga telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur vital di Gaza. Di saat yang sama, pemerintah Israel terus melanjutkan proyek pemukiman ilegal bagi warga Israel di wilayah pendudukan lainnya (*West Bank*/Tepi Barat dan Jerussalem Timur) yang semakin memperkecil wilayah bagi pendirian negara Palestina di masa depan (Anadolu Agency, 2024; Middle East Monitor, 2024; United Nations, n.d.).<sup>2</sup> Di kalangan aktivis pro-Palestina global, tindakan tersebut dianggap sebagai *illegal settler colonialism* (Luerdi et al., 2024).

---

<sup>1</sup> Aksi tersebut diklaim sebagai balasan terhadap penindasan dan penistaan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga Israel di wilayah pendudukan, khususnya di tempat suci Masjid Al-Aqsa.

<sup>2</sup> Walaupun telah diakui oleh sebagian besar negara anggota PBB, Palestina bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Israel mengontrol pemerintahan otoritas Palestina dan wilayah pendudukan Palestina berada di bawah yurisdiksi hukum Israel. Otoritas Palestina telah mengajukan proposal keanggotaan di PBB, namun diveto oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel.



Gambar 1. Tanah Palestina dari Waktu ke Waktu (UCCPIN, n.d.)

Sumber: <https://www.uccpin.org/land-loss-timeline>

Walaupun agresi militer Israel saat ini telah menciptakan krisis kemanusiaan yang parah, PBB tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai penjaga perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB berkali-kali gagal menghasilkan resolusi perdamaian untuk konflik ini sebagai konsekuensi dari tatanan dunia yang berdasarkan *power* (*power-based order*). Situasi ini sering menjadi pertanyaan dan perdebatan di kalangan pengamat atau penstudi hubungan internasional, termasuk mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila). Untuk memahami fenomena ini, perlu untuk menelusuri bagaimana pembuatan keputusan penting di Dewan Keamanan PBB terkait konflik dan bagaimana pula kontestasi kepentingan negara-negara besar, khususnya P-5 mempengaruhi upaya penyelesaian konflik.

Secara lebih nyata, mahasiswa Jurusan HI FISIP Unila perlu mengikuti kegiatan simulasi *Model of United Nations*, dalam hal ini praktik sidang Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pengalaman dan pemahaman tentang dinamika keamanan internasional melalui simulasi sidang Dewan Keamanan PBB. Selain itu, kegiatan ini bertujuan melatih *softskill* berupa kepemimpinan dan kemampuan *problem-solving* khususnya ketika berada di dalam forum global.

## 2. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 minggu (27 Nov – 4 Des 2023) dengan agenda utama dalam bentuk praktik sidang model Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan di Ruang B.3.1 FISIP Unila. Kegiatan ini mengusung tema “*humanitarian resolution in the Palestine-Israel war.*” Sasaran atau peserta kegiatan ini adalah mahasiswa Jurusan HI FISIP Unila, khususnya mahasiswa semester 5. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HI FISIP Unila. Adapun intruksi bahasa yang digunakan oleh peserta selama agenda utama adalah salah satu bahasa resmi PBB yaitu Bahasa Inggris.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahapan; pra-kegiatan dan kegiatan utama (agenda utama) seperti penjelasan berikut:

No	Tahapan	Tempat	Keterangan (Kegiatan)
1	Pra-kegiatan	Ruang C.3.1 dan <i>Smartroom</i> Jurusan HI FISIP Unila	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instruktur mempersiapkan berbagai berkas yang dapat digunakan oleh peserta selama kegiatan utama.</li><li>• Seluruh peserta dibagi kedalam beberapa kelompok delegasi/perwakilan berdasarkan negara-negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB (P-5 dan anggota tidak tetap), termasuk delegasi undangan seperti Palestina dan Israel, bersama Sekretaris Jenderal PBB.</li><li>• Peserta secara berkelompok melakukan riset terkait pandangan politik dan kebijakan negara yang diwakili tentang isu yang akan diperdebatkan.</li><li>• Seluruh peserta yang berperan sebagai Presiden, ketua delegasi negara anggota Dewan Keamanan, dan Sekretaris Jenderal PBB melakukan <i>briefing</i> untuk pemantapan pelaksanaan agenda utama dengan pengarahan dari instruktur.</li></ul>
2	Agenda utama	B.3.1 FISIP Unila	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instruktur memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan, termasuk berbagai skenario selama kegiatan berlangsung.</li><li>• Presiden Dewan Keamanan PBB memimpin sidang secara penuh, termasuk mengendalikan dinamika perdebatan dan pengambilan keputusan selama persidangan.</li><li>• Instruktur mengamati secara seksama dan mempersiapkan catatan kritis terkait pelaksanaan agenda utama.</li></ul>

- 
- Instruktur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan, mulai dari hal-hal keprotokoleran sampai pada substansi.
- 

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan  
Sumber: dokumentasi tim pengabdian

### 3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, kegiatan ini memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pengalaman dan pemahaman tentang dinamika perdebatan dan proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB terkait isu keamanan internasional, khususnya konflik Palestina-Israel. Secara khusus, melalui kegiatan ini peserta dapat menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merancang *country policy statement*.

*Policy statement* merupakan pandangan politik delegasi yang mewakili kebijakan negara terkait isu yang sedang diperdebatkan. Dalam hal ini peserta secara berkelompok merancang *policy statement* yang disampaikan pada sesi persidangan.

2. Merancang resolusi.

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan upaya atau alat politik untuk mewujudkan perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik. Dalam kegiatan ini, resolusi dirancang secara berkelompok oleh delegasi yang telah ditunjuk/disepakati (konsultasi dengan instruktur).

3. Mempraktikkan kepemimpinan.

Kepemimpinan, termasuk kemampuan *problem-solving* merupakan hal yang krusial selama persidangan, mulai dari pembukaan sampai penutupan, termasuk sesi pemungutan suara (*voting*) dan diskusi/perdebatan. Secara nyata, Dewan Keamanan merupakan badan PBB yang paling penting di mana kepentingan negara-negara besar diperdebatkan terkait konflik-konflik besar yang sedang terjadi. Selama persidangan, peserta dilatih untuk menyampaikan pandangan ataupun memberikan argumen dan sanggahan terkait isu yang dibicarakan. Secara khusus, peserta yang berperan sebagai Presiden dilatih untuk mengakomodir perbedaan pandangan dan mengarahkan agar perdebatan dapat berjalan dengan lancar.

4. Merespon pandangan politik dan rancangan resolusi.

Selama persidangan, peserta diberikan kesempatan untuk merespon pandangan politik delegasi negara lain dan rancangan resolusi yang telah diusulkan. Respon tersebut merupakan perwujudan sikap politik dan kepentingan negara yang diwakili.

5. Menerapkan berbagai ungkapan bahasa (*language expressions*) diplomatik.

Dalam forum-forum internasional, delegasi-delegasi biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa diplomatik dalam menyampaikan pandangan terkait isu tertentu. Selama kegiatan utama ini, peserta dapat mempraktikkan menggunakan berbagai ungkapan bahasa yang lazim digunakan di forum-forum PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk komunikasi resmi.





Gambar 2. Foto-Foto Kegiatan  
Sumber: dokumentasi tim pengabdian

#### 4. Penutup

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian tidak menemukan kendala yang berarti mulai dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan agenda utama. Namun, tim pengabdian menilai ruangan yang digunakan untuk kegiatan utama tidak merepresentasikan ruangan model persidangan layaknya di Dewan Keamanan PBB. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya fasilitas ruang sidang yang diperuntukkan khusus bagi kegiatan-kegiatan praktik persidangan ataupun pengambilan keputusan forum-forum global di lingkungan FISIP Unila. Walau demikian, kegiatan ini tetap mengedepankan substansi dan fokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh tim pengabdian. Secara umum kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan peserta dapat berpartisipasi selama kegiatan.

#### Referensi

- Anadolu Agency. (2024, July 3). *Israel plans to build 5,300 more settlement units, expanding illegal housing in West Bank*. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-plans-to-build-5-300-more-settlement-units-expanding-illegal-housing-in-west-bank/3264783>
- Luerdi, L., Fitria, A., & Karisma, G. (2024). *Solidarity beyond city halls: a study of city transnational activism on Palestine question*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/53174/>

Middle East Monitor. (2024). *Israel confiscates 24m square metres of land in West Bank for illegal settlements*. <https://www.middleeastmonitor.com/20240703-israel-confiscates-24m-square-metres-of-land-in-west-bank-for-illegal-settlements/>

UCCPIN. (n.d.). *Palestinian Loss of Land Over Time*. Retrieved December 12, 2023, from <https://www.uccpin.org/land-loss-timeline>

United Nations. (n.d.). *Human Rights Council Hears that 700,000 Israeli Settlers are Living Illegally in the Occupied West Bank – Meeting Summary (Excerpts)*. Retrieved December 24, 2023, from <https://www.un.org/unispal/document/human-rights-council-hears-that-700000-israeli-settlers-are-living-illegally-in-the-occupied-west-bank-meeting-summary-excerpts/>

Xinhua. (2024, May 26). *Palestinian death toll in Gaza rises to 35,984: ministry*. <https://english.news.cn/20240526/1a81d09331d84ad48f3d5c7f1d523444/c.html>